

ORGANISASI KEAGAMAAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL: NAHDLATUL ULAMA (NU) 1926-1945

Dea Hutapea¹, Desman Sitohang², Siti Mawar Naibaho³

¹ Universitas Negeri Medan. E-mail: deahutapea73@gmail.com

² Universitas Negeri Medan. E-mail: desmansitohangpoulin123@gmail.com

³ Universitas Negeri Medan. E-mail: sitimawarn@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-04-29

Review : 2024-05-10

Accepted : 2024-05-25

Published : 2024-05-31

KATA KUNCI

Organisasi, Keagamaan, Pergerakan
Nasional, NU 1926-1945

A B S T R A K

Artikel ini mengulas evolusi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sepanjang pergerakan nasional dari tahun 1926 hingga saat ini. Dengan pendekatan sejarah dan analisis perkembangan sosial, penelitian ini mengeksplorasi transformasi organisasi, peran politik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. NU, didirikan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari sebagai respons terhadap modernisasi Islam, tumbuh menjadi kekuatan sosial dan politik yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi, historiografi (penulisan). Hasil dari penelitian ini adalah pada masa pergerakan kemerdekaan hingga era reformasi, NU terlibat dalam proses politik dan pembentukan identitas nasional. Dengan jaringan kelembagaan yang kuat, NU menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak pada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, organisasi ini juga dihadapkan pada tantangan seperti modernisasi internal, pluralitas politik, dan isu-isu keagamaan kontemporer. Penelitian ini menyoroti peran NU dalam mengamankan pluralisme agama, mempromosikan perdamaian, dan memperjuangkan keadilan sosial. Implikasi politik NU juga diperdebatkan, dengan pandangan yang beragam tentang hubungan antara agama dan negara.

PENDAHULUAN

Sejak awal abad ke-20, pergerakan nasional di Indonesia telah menjadi arena penting bagi perkembangan politik, sosial, dan budaya di negeri ini. Di tengah gelombang perubahan ini, organisasi keagamaan memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi arus politik dan pemikiran masyarakat. Salah satu organisasi yang menonjol dalam konteks ini adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan pada tahun 1926 oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. NU tidak hanya menjadi suara bagi Islam tradisional, tetapi juga menjadi kekuatan politik yang memengaruhi arah pergerakan nasional Indonesia. Sebagai organisasi yang berakar dalam tradisi Islam yang moderat dan lokal, NU telah mengalami evolusi yang mencolok sepanjang sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam kurun waktu yang

panjang, NU telah menjadi wadah bagi para ulama, aktivis, dan intelektual Islam yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia serta pembangunan negara setelahnya. Peran NU dalam memfasilitasi penyatuan bangsa, memperjuangkan hak-hak politik, dan mempromosikan pendidikan serta kesejahteraan sosial telah menjadikannya sebagai salah satu kekuatan utama dalam panorama politik Indonesia.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berhaluan Ahlusunnah wal Jamaah dan mengandung empat mazhab yakni Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nahdlatul Ulama sendiri ikut berperan melawan penjajahan di Indonesia mulai dari penjajahan kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang. Peran serta Nahdlatul Ulama sudah terealisasi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pada waktu penjajahan Belanda Nahdlatul Ulama tidak mengekspresikan sikap anti penjajah secara radikal dan terang-terangan, akan tetapi gerakan sikap anti penjajah NU dilakukan secara diam-diam dan ditumbuhkembangkan melalui pondok pesantren. Oleh karena itu bersama dengan gerakan Islam seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) tahun 1937 dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939, Nahdlatul Ulama menghendaki dibentuknya parlemen dengan tujuan agar pemerintah Hindia Belanda dapat terkontrol (Sutarto, 2005:45-46).

Pada masa pendudukan Jepang aktivitas Nahdlatul Ulama terpusat pada perjuangan membela tanah air baik secara fisik maupun politik serta mewujudkan Indonesia merdeka. Pada awalnya Nahdlatul Ulama bersikap kooperatif terhadap pemerintah Jepang dalam rangka mengusir penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Sikap Nahdlatul Ulama terhadap Jepang tidak sekeras ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Apabila pada masa penjajahan Belanda Nahdlatul Ulama menolak duduk dalam Volskraad, namun pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama justru memilih bersikap lunak dan diplomatis dengan memanfaatkan kerjasama dengan Jepang dalam bentuk apapun (Ridwan, 2010: 56-59).

Namun, untuk memahami sepenuhnya peran NU dalam pergerakan nasional Indonesia, kita perlu melihat lebih dekat pada perkembangan organisasi ini dari perspektif historis. Dengan menelusuri jejak sejarah NU, kita dapat mengungkap berbagai faktor yang membentuk dan memengaruhi perjalanan organisasi ini, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang evolusi NU dari tahun 1926 hingga saat ini, dengan penekanan pada peran politik, sosial, dan keagamaannya dalam konteks pergerakan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data-data yang dipergunakan adalah sejarah mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1926-1945. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif. Langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 1986: 32). Langkah pertama adalah Heuristik yakni peneliti melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa buku, artikel, laporan penelitian, maupun jurnal yang berkaitan dengan Strategi Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-sekarang. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber sejarah yang

diperoleh dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku referensi.

Langkah selanjutnya adalah Kritik yakni kritik sumber yang dilakukan secara intern dan ekstern. Pada kegiatan kritik intern peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan. Selanjutnya dalam hal ini (kritik intern) dilakukan penilaian secara kritis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul. Pada kegiatan ekstern penulis melakukan kritik pada identitas buku untuk mengetahui keaslian atau keotentikan sumber-sumber yang ada. Untuk sumber-sumber yang berupa dokumen, buku, artikel dan surat kabar penulis melakukan perbandingan antar satu sumber dengan sumber lainnya. Langkah selanjutnya adalah Interpretasi yakni merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta sejarah yang mempunyai kesesuaian satu sama lain yang kemudian dilakukan suatu penafsiran agar bermakna. Interpretasi dilakukan untuk menentukan makna yang saling berkaitan dalam fakta-fakta yang telah diperoleh. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya. Kegiatan interpretasi ini ialah suatu proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain yang telah terhimpun dan berhubungan dengan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia Tahun 1926-1945. Langkah terakhir adalah Historiografi yakni merupakan klimaks dari penelitian sejarah yaitu menulis hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan cerita sejarah tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia Tahun 1926 – 1945 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis dan dapat diyakini serta dibuktikan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah NU (Nahdlatul Ulama)

Nahdlatul Ulama (NU), atau dalam bahasa Indonesia berarti 'Kebangkitan Ulama', adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan mencapai lebih dari 95 juta pada tahun 2021, menjadikannya organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah dan rumah sakit serta mengorganisir komunitas untuk membantu mengurangi kemiskinan. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.

Organisasi ini lahir sebagai respons terhadap fenomena dalam dan luar negeri, khususnya di dunia Islam. Dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, NU mengidentifikasi Al-Quran, Sunnah, dan kemampuan pikiran yang dipasangkan dengan realitas empiris sebagai sumber pemikirannya. NU juga mengikuti aliran Ashari dan Maturidi, mengambil jalan tengah antara kecenderungan rasionalis dan scripturalis. NU juga menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kekayaan budaya Nusantara serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.

Pada saat pendiriannya, NU dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) serta Kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. NU dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Sejak pendiriannya, NU terus berkembang dan menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, hidup berdampingan dengan Muhammadiyah. NU memiliki peran besar dalam memajukan agama, sosial, dan politik di Indonesia.

Dengan sejarah panjangnya, NU telah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki peran yang signifikan dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. NU memiliki jutaan anggota yang terdiri dari ulama, santri, dan masyarakat umum, serta ribuan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi pusat pendidikan agama dan sosial. Sejarah panjang dan pengaruh yang besar membuat NU menjadi salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, dengan peran yang signifikan dalam pembangunan sosial, politik, dan agama di negara ini. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi yang berkecenderungan ke arah politik, di bawah pimpinan Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya pada K.H. Hasyim Asyari untuk perlunya didirikan NU. Sampai dua tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU.

Latar Belakang NU Dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Pada awal abad ke-20, Indonesia mengalami fase kebangkitan nasional yang menjadi titik penting dalam sejarah bangsa. Pada tahun 1908, pergerakan nasional dimulai, di mana perjuangan rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Faktor internal yang melatarbelakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia termasuk munculnya kaum terpelajar akibat Politik Etis yang diterapkan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penderitaan rakyat akibat penjajahan, yang memunculkan semangat untuk bersatu mengumpulkan kekuatan untuk mengusir penjajahan Belanda. Sementara faktor eksternal melibatkan pengaruh gerakan nasional di negara tetangga, seperti India dan Filipina, yang memberikan inspirasi para pejuang pergerakan nasional di Indonesia untuk berjuang melawan penjajah.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki peran penting dalam pergerakan nasional. NU lahir sebagai respons terhadap fenomena dalam dan luar negeri, dan memiliki komitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Dengan sejarah panjangnya, NU telah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, hidup berdampingan dengan Muhammadiyah, dan memiliki peran besar dalam memajukan agama, sosial, dan politik di Indonesia. Sebagai bagian dari pergerakan nasional, NU juga turut berperan dalam menjaga dan menghormati kekayaan budaya Nusantara serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT

maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Dengan jutaan anggota yang terdiri dari ulama, santri, dan masyarakat umum, serta ribuan pesantren di seluruh Indonesia, NU telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, dengan peran yang signifikan dalam pembangunan sosial, politik, dan agama di negara ini.

NU Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU turut berperan dalam memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Selain itu, NU juga memiliki komitmen untuk menjaga dan menghormati kekayaan budaya Nusantara serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Selama masa penjajahan Belanda, NU juga turut berperan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan memerangi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Umat Islam, terutama anggota NU, diwajibkan untuk mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini dianggap sebagai perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer, sementara mereka yang tinggal di luar radius tersebut diharapkan membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.

Dengan komitmen kuat terhadap ajaran Islam dan perjuangan kemerdekaan, NU memainkan peran penting dalam mempersatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Melalui peran aktifnya, NU turut berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memerangi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

1. Bidang Politik

Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap Islam

Berubahnya konstelasi politik di Belanda di awal abad 20 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tanah jajahan terutama di Jawa. Kelompok Liberal yang menguasai parlemen Belanda secara terang-terangan menekan pemerintah Belanda untuk merubah kebijakannya di wilayah jajahan. Kelompok ini memperjuangkan nilai-nilai kebebasan dan persamaan derajat, dalam konteks ini mereka menginginkan pemerintah Belanda memberikan keesejahteraan di wilayah jajahan. Diantara tokoh-tokoh dari kelompok Liberal ini antaralain P. Brooshooft, Van Deventer, Van Limburg Stirum, mereka yang menginisiasi politik etis di Hindia Belanda (Scholten, 1996 : 39).

Pasang Surut Hubungan Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Secara umum pada masa itu kebijakan NU mengenai posisi pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah mengakui eksistensinya, dalam rapat-rapat akbar NU selalu mengakui keberadaan pemerintah kolonial dan memuji kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dalam persoalan agama Islam dan Umat. Menurut laporan pejabat Belanda, rapat akbar yang dilakukan oleh NU di Masjid Ampel dihadiri oleh banyak sekali umat Islam untuk mendengarkan pidato-pidato yang di dalamnya disampaikan tentang pujian terhadap pemerintahan non muslim (Bruinessen, 1999: 41).

Dalam sebuah surat terbuka untuk umat Islam Indonesia yang dikeluarkan oleh HBNO afd. Syuriah dan ditanda tangani oleh Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari,

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dipuji-puji karena telah banyak mengabdikan permintaan-permintaan masyarakat NU sehingga terjadi banyak perbaikan-perbaikan dalam persoalan agama dan umat.

2. Bidang Sosial

Gerakan Emansipatoris

Paradigma emansipasi menjelaskan bahwa proses gerak masyarakat bukan berlangsung dalam satu arah, melainkan bersifat dialektik atau timbal balik, dengan demikian gerak masyarakat disebabkan lebih karena hasrat emansipatoris. Emansipasi adalah proses perjuangan kolektif dari sebuah kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem. Gerakan ini dimulai dengan munculnya kontrapunkt, sebuah perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan.

Ahlusunnah wa al-Jamaah

Menurut K. Mawardi muncul atau berdirinya Nahdlatul Ulama yang paling mendasar adalah untuk melindungi dan mengamankan paham keagamaan mereka. Dalam konteks ini memahami secara memadai mengenai paham keagamaan Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting, pemahaman ini dibutuhkan untuk mengetahui basis perilaku organisasi Nahdlatul Ulama dan pengikutnya (K. Mawardi, 2006: 11). Tahun 1920-an menjadi masa-masa terjadinya perdebatan persoalan khi- lafiyah dalam masyarakat muslim Indonesia, berkaitan dengan persoalan bermazhab, bid'ah dan persoalan khilafiyah fiqhiyah yang lain.

3. Bidang Ekonomi

Generasi Muda dan Revitalisasi Gerakan Ekonomi NU

Pada 1918, KH Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatut Tujar untuk mengangkat ekonomi umat. Menjadi pekerjaan rumah generasi muda NU untuk merevitalisasi gerakan ekonomi NU yang pernah berjaya pada masa kolonial Belanda ini. Perjuangan umat Islam dalam membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda, menjaga keutuhan Negara Indonesia, memerangi kemiskinan dan kebodohan dengan basis ekonomi kerakyatan serta membangun peradaban bangsa hingga saat ini tidak lepas dari peran para ulama seabad yang lalu dengan mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Tepat pada 31 Januari 1926 M atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H, lahir organisasi Islam terbesar di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama (NU). Artinya, jika dihitung dalam penanggalan Hijriah, usia NU sudah memasuki usia 100 tahun. Waktu yang cukup lama bagi sebuah organisasi untuk tetap eksis bergerak dalam memperjuangkan cita-citanya baik dalam kancah politik maupun dalam perekonomian nasional.

4. Bidang Pendidikan

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan

pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar,¹ selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

5. Bidang Militer

Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna dan sangat yang terang dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia, utamanya dalam perlawanan menentang penjajahan Belanda, merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik saat seluruh bangsa mempertaruhkan hidup dan mati untuk tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam sepanjang masa Imperialisme di bumi Nusantara ini, sehingga kemanapun kita mencoba melacak jejak perjuangan dimasa penjajahan maka senantiasa pula akan kita temukan pijaran api semangat perjuangan Islam dimana-mana. Mempelajari tentang sejarah perjuangan perlawanan umat Islam Indonesia melawan penjajah Belanda, maka dalam perjalanannya akan kita temukan periode dimana bermunculan berbagai macam lembaga atau organisasi sosial dan keagamaan yang berjuang mewartakan kekuatan ummat sebagai salah satu potensi yang menopang untuk tegaknya kedaulatan negara. Perjuangan umat Islam dan organisasi yang mewartakannya dapat dilihat mulai dari lahirnya SDI (Serikat Dagang Indonesia) tahun 1911 M yang kemudian pada tanggal 10 September 1912 menjadi wadah Serikat Islam (SI), kemudian muncullah organisasi Muhamadiyah tahun 1912, kemudian disusul NU pada tahun 1926 di bawah pimpinan oleh KH. Hasyim Asy'ari, dimana NU tampil sebagai pionir dan perintis kemerdekaan semenjak masa jauh sebelum Indonesia merdeka dan merekapun ikut menjadi bagian pendiri dari negara Republik Indonesia ini.

NU Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, peran Nahdlatul Ulama (NU) sangat signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia, namun hal ini berubah setelah diketahui Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam mempertahankan jati diri umat Islam di tanah air. Meskipun kegiatan organisasi Islam seperti NU sempat dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang, NU tetap berjuang secara diam-diam untuk mempertahankan eksistensi dan perjuangan umat Islam. Pada bulan September 1943, atas permintaan KH Abdul Wachid Hasyim, pemerintah Jepang akhirnya mengizinkan kembali kegiatan NU. Kemudian pada akhir Oktober 1943, perjuangan diplomasi NU terus ditingkatkan melalui berdirinya wadah perjuangan baru umat Islam yang bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). KH Hasyim Asy'ari diangkat sebagai pemimpin tertinggi Masyumi, sedangkan KH Abdul Wachid Hasyim duduk sebagai wakilnya.

Melalui Masyumi, NU terus berjuang untuk mempertahankan jati diri umat Islam di tengah pendudukan Jepang. Bahkan KH Hasyim Asy'ari secara terbuka menentang kebijakan Jepang yang dianggap melanggar syariat Islam, seperti kebijakan wajib belajar bahasa Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Perjuangan NU ini menunjukkan semangat perlawanan terhadap penjajah meskipun dilakukan secara halus.

1. Bidang Politik

Peran di bidang politik ini sangat jelas terlihat ketika KH. Abdul Wahid Hasyim juga terlibat aktif dalam perumusan konstitusi dan dasar negara bersama tokoh lain yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoeseno Tjokrosjojoso, H. Agus Salim AA Maramis dan Abdul Kahar Muzakir yang disebut panitia sembilan. Mereka membubuhkan tanda tangannya pada piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Preambule atau pembubukan Undang – Undang Dasar dalam naskah pembukaan itulah disebutkan bahwa pancasila menjadi dasar negara Indonesia telah menjadi salah satu bukti bahwa Nahdlatul Ulama memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan langsung terjun dalam perpolitikan di Indonesia.

2. Bidang Sosial

Peran Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang bidang sosial tidak terlalu banyak dilakukan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang memfokuskan pada status sosial masyarakat. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang ini peran Nahdlatul Ulama hanya fokus pada perlawanan dan perjuangan untuk membebaskan atau mensejahterakan para pekerja yang dipekerjakan oleh Jepang (Romusha) sebagaimana yang diuraikan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat pada waktu itu sangat memprihatinkan karena harus menjadi pekerja paksa yang tidak diupah dan diperlakukan semena-mena oleh pihak Jepang yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh selama pelaksanaan Romusha yang diterapkan oleh pihak Jepang.

3. Bidang Ekonomi

Melihat kenyataan yang ada di bidang ekonomi ini, organisasi Nahdlatul Ulama menunjukkan perannya sebagai organisasi sosial yang bergerak tidak hanya di bidang agama saja, melainkan juga memperhatikan ekonomi rakyat. Ini menjadi reaksi dari adanya sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang tentunya sangat merugikan rakyat pribumi. Ekonomi yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama adalah dengan mendirikan perserikatan dagang bersama serta ekonomi sistem koperasi. Dalam hal perserikatan dagang ini Nahdlatul Ulama lebih memfokuskan pada sistem perdagangan Islam, dan yang menjadi anggota perserikatan ini adalah para pedagang muslim dan tentunya yang menjadi lahan pasar adalah penduduk pribumi sendiri yang tentunya akan saling memberikan keuntungan di masing-masing pihak, tidak seperti ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang mana hanya menguntungkan pihak Jepang dan merugikan pihak pribumi.

4. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan ini peran Nahdlatul Ulama tidak jauh berbeda dengan perjuangan dan pergerakan organisasi mereka pada masa penjajahan Belanda, yaitu tetap memfokuskan diri pada pendidikan dunia pesantren, yang didalamnya memang hanya memfokuskan diri pada pembelajaran agama dan penguatan nasionalisme. Yang membedakan hanya pada jumlah lembaga pendidikan yang pada masa pendudukan Jepang semakin banyak, karena memang kesediaan akan pendidikan rakyat Indonesia semakin meningkat. Apalagi ditambah dengan semangat perjuangan untuk

memerdekakan diri dari para penjajah, termasuk Jepang sendiri. Sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berkiprah dan menunjukkan jati diri sebagai organisasi yang bergerak di bidang agama dan sosial untuk terus menguatkan paham agama Islam dan ikut membela perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

5. Bidang Militer

Pada masa penjajahan Jepang menguasai Indonesia, arena perjuangan NU justru semakin melebarkan sayapnya. Sikap anti penjajah yang memang sudah pembawaannya, menyebabkan antisipasi terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut keselamatan negara semakin ditingkatkan, lebih-lebih lagi ketika kehadiran tentara sekutu dan NICA (Belanda) mendarat di Indonesia dan dimana-mana melakukan teror untuk merobohkan negara Republik Indonesia yang masih sangat mudah pada waktu itu. Kondisi yang sangat genting seperti ini menjadikan NU di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari (yang merasa mempunyai andil dalam proses-proses perumusan kemerdekaannya) terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkenal dengan nama "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebuah kebulatan tekad yang isinya menwajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam keselamatan negara Republik Indonesia. Peran NU dan keterlibatannya yang besar hampir seluruh warga NU untuk menjalankan jihad mengusir penjajah ini, pada gilirannya bisa mendorong kehendak kuat bagi negara dan NU untuk menuntut peranannya yang lebih besar dalam perjuangan selanjutnya (mengisi kemerdekaan) yang tentunya berlandaskan pada semangat nilai-nilai Resolusi Jihad dengan bentuk aktualisasi yang lain.

Pola perjuangan NU Dalam Pergerakan Nasional Indonesia

1. Perjuangan NU pada masa penjajahan Belanda

Pemerintah kolonial Belanda selain bermaksud mengeruk kekayaan alam di Indonesia, juga bermaksud melancarkan misi Kristen untuk ditanamkan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Misi Kristen ini sangat membangkitkan amarah dan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh para raja dan pemimpin agama (ulama). Perlawanan para ulama terhadap kolonial Belanda semakin keras ketika secara terang-terangan pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Kristening Politiek yaitu kebijakan menasranikan rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut telah mendobrak para Ulama khususnya Nahdlatul Ulama untuk menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren agar suatu saat menjadi senjata ampuh untuk melawan dan mengusir penjajah. Dengan demikian perlawanan sudah mulai terorganisasi namun bukan dalam bentuk kekerasan. Model perlawanan seperti ini, pada saat kapanpun bisa dipergunakan untuk menekan kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan Islam (Anam, 1985: 18-26). Dalam perkembangannya Nahdlatul Ulama semakin gencar dalam usaha menyejahterakan rakyat disamping adanya tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Usaha yang dilakukan Nahdlatul Ulama mencakup di beberapa bidang seperti sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan media komunikasi.

2. Perjuangan NU pada masa pendudukan Jepang

Rakyat Indonesia yang pada awalnya menyambut hangat kedatangan Jepang setelah tahu maksud sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia menimbulkan rasa kebencian. Menurut Nahdlatul Ulama Jepang tidaklah lebih baik dari Belanda, namun dari segi politik antara Belanda dengan Jepang itu berbeda. Belanda dalam menjalankan

politiknya masih mempunyai ideologi demokrasi ala penjajah, sedangkan Jepang tidak mempunyai demokrasi namun fasis yaitu berbentuk paksaan. Para tokoh agama termasuk tokoh NU beranggapan bahwa Jepang masih lebih baik daripada Belanda, mengenai hal pelibatan para pemimpin Indonesia untuk ikut mengatur persoalan negara. Oleh karena itu, sikap NU terhadap Jepang tidak sekeras ketika menghadapi Belanda. Apabila di masa penjajahan Belanda NU menolak duduk dalam “Voolksraad” buatan pemerintah Hindia-Belanda. Sebaliknya, dalam pemerintahan Jepang NU telah memilih sikap lunak dan diplomatis dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun. Pada masa pendudukan Jepang, kyai dan ulama muncul sebagai elemen baru dalam kehidupan politik nasional.

Nahdlatul Ulama bersikap lebih lunak terhadap Jepang dan menjalin kerjasama dengan pemerintahan Jepang dengan menerima tawaran menduduki jabatan Kementerian Agama (Shumubu) dan menjadi anggota pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Pemerintah Jepang berusaha menarik dukungan dari kekuatan-kekuatan anti Belanda dengan jalan mendekati umat Islam yang ada di Indonesia. Sikap kerjasama Nahdlatul Ulama terhadap Jepang bukan berarti Nahdlatul Ulama dapat dibeli oleh Jepang, akan tetapi disanalah letak menghadapi lawan. Sikap seperti ini disebut sikap Yahannu (dalam menghadapi lawan, bukan untuk menghadapi kawan). Karena sikap Yahannu inilah maka KH. Wahid Hasyim dan beberapa tokoh NU dari Jawa Barat, Cirebon diangkat oleh Jepang untuk menjadi anggota legislatif buatan Jepang yakni Chuo Sangi-in.

3. NU tergabung dalam organisasi Jepang

Pendekatan NU kepada Jepang telah berhasil, hal ini terlihat ketika Jepang memberikan kedudukan politik dan sosial kepada para ulama dengan menjadikan para ulama anggota Chuo Sangi In dan Syuu Sangai Kai. Pada tanggal 22 November 1943 atas prakarsa kedua organisasi tersebut lahirlah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai badan federasi organisasi Islam sekaligus menggantikan kedudukan MIAI yang bubar bersamaan terbentuknya Masyumi (Benda, 1980: 182). Diplomasi para ulama dengan para pemerintah Jepang berhasil mendirikan Shumubu-cho (Kantor Urusan Agama Pusat) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari. Shumubu-cho mempunyai kantor cabang di setiap karesidenan yang bernama Shumuka (Kantor Urusan Agama Daerah) yang sebagian besar pimpinannya dipercayakan kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama tingkat daerah. Berbeda ketika penjajahan Belanda, pada saat penjajahan Jepang Nahdlatul Ulama tidak menunggu tawaran milisi dari Jepang tetapi mendesak Jepang agar mendidik pemuda dalam bidang militer. Guna semakin memperkokoh kekuatan militer, NU memelopori terbentuknya tentara sukarela Islam.

4. Peran serta NU dalam proses perumusan ideologi negara dan pancasila sebagai dasar negara

Pada tanggal 29 April 1945 melalui makloemat Gunseikan No. 23 dibentuklah “Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Adapun tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut berperan aktif dalam mengambil bagian pada lembaga ini adalah KH. Masjkur dan KH. Wahid Hasyim. Dalam sidang pertama ini BPUPKI dibentuk menjadi tiga panitia pembahas yaitu pembahas konstitusi, pembahas militer, dan pembahas perekonomian negara. KH. Wahid Hasyim termasuk dalam kelompok pembahas konstitusi yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam rapat ini KH. Wahid Hasyim termasuk kelompok yang menginginkan agar negara dibentuk berdasarkan syariat Islam mengingat agama Islam adalah agama

mayoritas penduduk di Indonesia. Golongan ini dikenal dengan golongan Islam. Tim perumus tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan rumusan Pancasila yang terkenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta berisi lima butir yang kelak menjadi Pancasila yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan kedailan bagi seluruh rakyat Indonesia (Anam, 1985: 127 – 128). Prinsip Ketuhanan yang merupakan pokok permasalahan di antara kalangan nasionalis muslim dan nasionalis sekuler sejak sebelum kemerdekaan diselesaikan tuntas oleh Nahdlatul Ulama dengan menyatakan bahwa sila itu mencerminkan tauhid Islam dengan dua pertimbangan, yaitu: 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan kekuasaan Allah, yang dikenal dengan sebutan tauhid; 2) Adanya pencantuman anak kalimat “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” pada Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa (Sitompul, 2010:183).

Sejak awal didirikan Nahdlatul Ulama tidak mencantumkan asas organisasi (jam’iyyah), melainkan langsung menyebut tujuan. Menurut Nahdlatul Ulama, Islam bukanlah ideologi tetapi Islam adalah agama Allah sedangkan ideologi adalah hasil pemikiran manusia. Asas suatu organisasi tidak harus agamanya, boleh juga asas kerakyatan, keadilan, kekeluargaan, dan sebagainya (Sitompul, 2010: 183). Argumentasi yang melandasi Nahdlatul Ulama menerima Pancasila tersebut ada tiga yakni Pertama, konsep fitrah yang sangat penting dalam Islam. Fitrah adalah dorongan yang sudah tertanam di dalam diri manusia untuk menemukan Tuhannya. Dorongan tersebut menyebabkan manusia menyerah diri (Islam) kepada Allah. Kedua, konsep ketuhanan. Nahdlatul Ulama menilai rumusan yang Maha Esa menurut Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, yang menjwai sila-sila lainnya, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” disini yang dinilai oleh Nahdlatul Ulama adalah kedudukan agama dalam negara adalah bersifat rumit dan gawat. Ketiga, pemahaman sejarah. Maksudnya adalah penerimaan Pancasila yang diperkuat oleh Mukhtar NU dengan peranan umat Islam menentang penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

5. Kontribusi NU Dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI

Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) terkait dengan menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NU menganjurkan untuk senantiasa memupuk persatuan di tengah masyarakat yang plural dengan cara menanamkan sikap menghargai perbedaan lewat komunikasi dialog dalam konteks mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Merespons berkembangnya upaya disintegrasi dan perpecahan antara bangsa kita sendiri yang mengakibatkan hilangnya komitmen kebangsaan terhadap integritas dan kesatuan bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi, kebebasan berpendapat dan ekspresi tanpa batas, yang mengakibatkan munculnya gerakan separatisme, radikalisme, konflik ras dan agama yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) merasa perlu untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan Indonesia dengan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Menurut NU disintegrasi bangsa, gerakan separatisme, radikalisme, konflik ras dan agama ini akan menghancurkan tertib dan struktur sosial

yang sudah mapan, sehingga merusak relasi sosial, yang kemudian memunculkan rasa saling curiga dan saling membenci yang berujung pada konflik sosial. Dalam situasi sekarang penguatan komitmen kebangsaan tidak bisa dijalankan dengan cara paksaan apalagi kekerasan tetapi perlu strategi kebudayaan baru untuk menata hubungan sosial dan hubungan antar bangsa berdasarkan kesetaraan dan kesukarelaan, sehingga solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan bisa diwujudkan dengan baik penuh kedamaian, oleh karenanya bagi warga Nandliyin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan.

Dari Partai NU ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

NU mendapat jabatan strategis pada masa orde lama tetapi menjadi terpinggirkan ketika orde baru berkuasa, NU menjadi organisasi terpinggirkan. NU dituduh pernah memiliki hubungan erat dengan Soekarno sehingga Orde baru memangkas akses politik NU. Departemen agama tidak lagi dihuni oleh aktifis NU. Seakan jalur politik Nu dibendung di semua daerah. Akibatnya, tidak hanya di departemen agama, di hampir semua wilayah politik NU juga termarginalkan. Keadaan demikian terjadi karena pada masa orde lama NU selalu mendukung semua hal kebijakan Presiden Soekarno sehingga pada masa Orde baru kekuatan politik NU harus dibatasi dengan menerapkan fusi partai politik sehingga ruang gerak NU terbatas. Padahal orde baru telah bekerja sama dengan para tokoh-tokoh NU untuk membersihkan para simpatisan PKI, tetapi kenyataannya orde baru mempunyai ketakutan terhadap kekuatan politik NU sehingga ruang geraknya tetap dibatasi dengan adanya fusi partai politik.

Muktamar partai NU ke 25 diselenggarakan pada 1971 dengan keputusan menolak fusi. Akibat kebijakan pemerintah yang kuat dan menekan, muktamar NU akhirnya memberikan rekomendasi kepada PBNU untuk mengadakan perubahan-perubahan organisasi sesuai dengan kondisi objektif. Akhirnya fusi diterima dengan segala konsekuensinya. Secara formal PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 dengan menggabungkan partai NU, PSII, Parmusi, dan Perti. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didirikan ini berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah, tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru, PPP menggunakan asas PANCASILA sesuai dengan sistm politik dan peraturan perundang undangan yang berlaku sejak 1984. Salah satu misi PPP adalah berkhidmad untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, meningkatkan mutu kehidupanberagama, mengembangkan ukuwah Islamiyah.

Struktur partai terdiri dari Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Kholid sebagai presiden Partai dengan wakil presiden MintaredjaSH, M Gobel, Rusli Halil dan KH Masjkur. Jabatan Presiden partai dalam perkembangannya dihapuskan dan hanya ada ketua umum. Dalam sejarahnya, ketua umum PPP pertama yang diangkat adalah MS Mintaredja (1973-1978).

SIMPULAN

Latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional di Indonesia di pengaruhi oleh kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nahdlatul Ulama yang pada awalnya lahir sebagai organisasi keagamaan menitikberatkan pada masalah lainnya merasa perlu terjun langsung dalam membela dan membebaskan tanah air dari belenggu penjajah bangsa asing yang ada di Indonesia. pola perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa

penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang sudah terealisasi. Pada masa penjajahan Belanda Nahdlatul Ulama menolak usulan agar anggotanya menjabat didalam Volksraad. Pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama lebih memilih bersikap kooperatif dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Nahdlatul Ulama bersikap lebih lunak terhadap Jepang dan menjalin kerjasama dengan pemerintahan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin farih. (2016). NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).
- Anam, Choirul, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Surabaya: Bisma Satu Press, 1998.
- Anisatul Khoir Aprilia Dkk, (2017) The Role Of Nahdlatul Ulama On Indonesian National Movement On 1926 - 1945.
- Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum Imam Hidayat, M. Pd.I (2023) RELASI SOSIAL POLITIK NAHDLATUL ULAMA PADA MASA PENJAJAHAN A BELANDA TAHUN 1926-1942 .
- Fahrudin, Fuad, Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, (Jakarta Pustaka Alvabet 2009) .50- 51.
- Gootschalk, L. 1969. Mengerti Sejarah. Terjemahan Oleh Nugroho Notosusanto 1986. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- K. Mawardi. Mazhab Sosial Keagamaan NU. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006.
- Ridwan, N.K. 2010. NU dan Bangsa 1914-2010, Pergulatan Politik dan Kekuasaan. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sitompul, E.M. 2010. NU dan Pancasila. Yogyakarta: Lkis.
- Sutarmo, Gerakan Sosial Keagamaan Modernis, (Yogyakarta: Suaka Alva 2005).100.
- Sutarto, Ayu. Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi, Jember: Kompyawisda Jatim. 2005.
- <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/?index.php/jusan>.